



Organisasi Cacat Pejuang Kemerdekaan Indonesia: Dari Ikatan Invaliden Indonesia Hingga Korps Cacat Veteran (1946-1983)

Rinie Cahaya Hati*¹, Nur'aeni Marta¹, Sri Martini¹

Corresponding email Author: Riniecahayahati.rch@gmail.com

¹Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Abstrak: Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu 1946-1949 menyebabkan banyaknya korban perang yang menjadi cacat. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perjuangan selanjutnya para prajurit yang menjadi cacat akibat perang Kemerdekaan Indonesia (1946-1983). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode historis yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pembentukan dan perkembangan organisasi cacat pejuang kemerdekaan Indonesia dalam usahanya untuk terus berguna bagi negara serta menyejahterakan kehidupan para anggotanya dalam kurun waktu 1946-1983. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan penelitian heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan berdirinya organisasi cacat pejuang kemerdekaan pada 1946 di Malang dengan nama Ikatan Invaliden Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk memberdayakan dan menyejahterakan korban cacat perang kemerdekaan dan dalam perkembangannya hingga 1983 menunjukkan bahwa organisasi ini memberikan sumbangsih bagi anggotanya yaitu mendapatkan kesejahteraan serta memberikan kesempatan untuk terus berguna bagi negara.

Kata Kunci: Invaliden, Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, Cacat Veteran.

Indonesian Independence Fighters Disabled Organizations: From Indonesians Invalid Bond To The Veterans Disabled Corp (1946-1983)

Abstrak: *The Indonesian War of Independence that occurred in the period 1946-1949 caused many war victims to become disabled. This research will discuss how the next struggle of the soldiers who became disabled as a result of the war of Indonesian Independence (1946-1983). This study aims to describe the formation and development of disabled organizations for Indonesian independence fighters in their efforts to continue to be useful to the country and to improve the lives of their members in the period 1946-1983. This study uses historical research methods with the stages of heuristic research, criticism, interpretation and historiography. The results of this study indicate that the establishment of a disabled organization for freedom fighters in 1946 in Malang under the name of the Indonesian Invaliden Association was motivated by efforts to empower and prosper the disabled victims of the war of independence and in its development until 1983 showed that this organization contributed to its members, namely getting welfare and providing opportunities for continue to be useful to the country.*

Keywords: *Invalid, Indonesian Republic Veteran Disability Corps, Veteran Disability.*

PENDAHULUAN

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dan tetap mempelajari sejarah dalam kehidupan sehari-harinya. Tema penelitian sejarah mengenai perjuangan dan kehidupan para pahlawan bangsa menjadi sangat penting dilakukan agar generasi penerus bangsa tetap mengingat jasa-jasa pahlawannya dan mempertahankan nilai-nilai yang diperjuangkan serta menambah wawasan sejarah juga khazanah keilmuan dalam pendidikan sejarah.

Sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta merta membuat Indonesia terlepas dari para penjajah. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, sesuai Perjanjian Wina pada 1942 setelah Jepang meninggalkan negara jajahannya, maka wilayah jajahannya diserahkan kepada sekutu (Setyohadi, 2002:73). Masuknya tentara sekutu yang diboncengi oleh Netherland Indies Civil Administration (NICA) mengakibatkan banyaknya pertempuran fisik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam kurun waktu 1945-1949, Indonesia harus berjuang kembali melawan para penjajah, mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai sebelumnya. Periode ini disebut dengan periode perang kemerdekaan.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap peperangan pasti ada korban yang berjatuhan. Korban dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949 tidaklah sedikit. Ada yang harus merengas nyawa di medan peperangan dan ada juga yang menjadi cacat setelah turun langsung dalam medan peperangan. Pahlawan yang tidak banyak dikenal masyarakat, namun memiliki aksi nyata dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak banyak penulisan mengenai bagaimana kehidupan para pejuang yang cacat akibat peperangan dan cara mereka tetap berjuang setelah keadaan yang tidak lagi sama, tidak banyak yang menyoroanya.

Pada 1946 di Malang, dibentuk organisasi yang menaungi para cacat pejuang yang disebut dengan invaliden atau bekas pejuang. Sebagian besar anggotanya adalah para pejuang yang mengalami kecacatan parah hingga yang sedang dirawat di rumah sakit. Organisasi tersebut bernama Ikatan Invaliden Indonesia yang diprakarsai oleh Asmara Hady (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, 1975:43).

Pada 1950, para cacat pejuang atau bekas pejuang harus dikeluarkan dari kesatuannya. Hal tersebut membuat para cacat pejuang bersatu dan membuat organisasi nasional dengan nama Ikatan Invaliden Seluruh Indonesia. Organisasi cacat veteran dalam perjalanannya beberapa kali berganti nama untuk mencari penyesuaian nama yang tepat bagi mereka. Pada 1952 Ikatan Invaliden Seluruh Indonesia berubah menjadi Ikatan Penderita Tjatjad Indonesia kemudian pada 1956 pada Kongres ke-3 nama organisasi kembali berubah menjadi Ikatan Tjatjat Veteran Indonesia hingga akhirnya pada 1966 menjadi perubahan nama terakhir yaitu Korps Cacat Veteran Republik Indonesia.

Penelitian mengenai organisasi cacat pejuang atau cacat veteran pejuang kemerdekaan menjadi penting mengingat belum adanya penelitian komprehensif yang membahas mengenai tema ini. Sementara itu, pada era modern seperti ini, sangat penting menanamkan nilai pendidikan sejarah mengenai menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsanya. Penelitian ini memberikan pengantar mengenai perjuangan kelanjutan dari para pejuang yang mengalami kecacatan akibat perang kemerdekaan Indonesia, ditengah kondisinya yang sudah tidak lagi sempurna, para pahlawan bangsa ini tetap berusaha untuk terus berguna bagi bangsa dan negara. Hal ini menjadi sangat penting dalam pendidikan sejarah untuk menanamkan nilai nasionalisme dan patriotisme yang tidak pernah berhenti.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam penelitian ini meliputi empat tahap penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 1986). Pada tahap heuristik penulis mengumpulkan sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Bapak Soepranoto Prawiro Wisastro yang merupakan Ketua Umum Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, arsip-arsip buku Majalah Kenang-kenangan Invaliden tahun 1950 dan arsip keputusan-keputusan pada saat konferensi dalam rentang waktu 1946-1983. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa surat kabar dan buku tematik mengenai sejarah militer dan sejarah Indonesia masa awal kemerdekaan.

Tahap selanjutnya adalah tahap kritik atau pengujian terhadap data atau sumber yang didapat sehingga menghasilkan fakta sejarah. Kritik ekstern dalam penelitian ini

dilakukan penulis dengan cara memperhatikan kondisi fisik data atau sumber. Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan cara membandingkan isi data atau sumber yang didapat dengan data atau sumber lain. Penulis melakukan banding silang informasi yang didapat melalui wawancara dengan informasi yang didapat dalam sumber tertulis.

Tahap selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. Pada tahap ini penulis menafsirkan dan menghubungkan fakta-fakta yang didapat agar ditemukan kesimpulan sejarah yang ilmiah. Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi. Historiografi adalah proses penulisan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber dalam bentuk penulisan sejarah dan menjadi sebuah karya yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Pembentukan Organisasi Cacat Veteran (1946-1950)

Satu hari setelah proklamasi Indonesia dikumandangkan yaitu pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang dan hasilnya adalah memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden (Dahm, 1987:379). Pada awal kemerdekaan, keadaan negara masih belum stabil, banyak masalah yang masih harus dihadapi. Ketika pemerintah Republik Indonesia merasa bahwa perlu memiliki suatu tentara resmi dan untuk menanggulangi seringnya terdapat bahaya dan ancaman serta pertempuran-pertempuran, maka Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Pada 24 Januari 1946 nama TKR diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pasukan inilah yang akhirnya turut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya harus mengalami banyak pertempuran fisik hingga 27 Desember 1949. Selain pasukan TNI terdapat masyarakat sipil yang juga ikut serta bertempur melawan pihak sekutu di berbagai daerah Indonesia. Periode perang kemerdekaan Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 ketika akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Berawal dari ketika pada akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Tanggung jawab merebut kembali wilayah Indonesia khususnya pulau Jawa dan Sumatera diserahkan kepada Komando Asia Tenggara dibawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten dari Inggris (Setyohadi, 2004:55).

Pada 24 Agustus 1945, Inggris dan Belanda pada tingkat pemerintah pusatnya mengadakan perjanjian bilateral di Chequers, London yaitu Perjanjian Urusan Sipil (*Civil Affairs Agreements*) dimana pada perjanjian ini mengakui sepenuhnya kedaulatan Belanda di Indonesia yang tidak boleh disentuh oleh tentara pendudukan serta *Netherlands Indies Civil Agreement* (NICA) yang akan menjalankan urusan sipil seluruhnya dengan diawasi oleh panglima besar sekutu. Inggris berjanji akan secepat mungkin menyerahkan tanggungjawab pemerintahan sipil kepada Belanda dan mempercepat pembentukan alat-alat administrasi dan kehakiman Hindia Belanda. Hal inilah yang membuat pemimpin-pemimpin Belanda datang kembali ke Indonesia dengan memiliki niat untuk memerintah kembali (Nasution, 1991:6).

Semula, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan sekutu dalam melaksanakan misinya bahkan dalam pelucutan senjata tentara Jepang dan mengirimnya ke pusat-pusat konsentrasi guna pemulangannya ke negara asal serta misi evakuasi para Interniran *Recovery of Allied Prisoners of War and Internees* (RAPWI) dipercayakan kepada Indonesia. Mengenai tugas kepercayaan ini, ditandatangani kontrak perjanjian antara Markas Besar Inggris dan Markas Besar Tentara Republik Indonesia pada 17 Januari 1946 yang dikenal dengan tugas Panitia Oeroesan Pangangkutan Djepang (POPDA) dan *Allied Prisoners of War and Internees* (APWI) yang dilaksanakan dengan baik sejak 24 April hingga 30 November 1946 (Setyohadi, 2004:57)

Kedatangan kembali tentara belanda membuat bangsa Indonesia khawatir akan kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia terlebih ketika telah diketahui maksud dari kedatangan NICA yang terang-terangan akan menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Sikap bangsa berubah jika semula menyambut dengan perasaan netral menjadi perasaan curiga yang kemudian meningkat menjadi sikap bermusuhan. Provokasi terang-terangan yang dilakukan oleh NICA sering menimbulkan insiden dan pertempuran rakyat Indonesia dengan sekutu yang dibantu oleh NICA Belanda.

Perang kemerdekaan Indonesia terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan pihak tentara Jepang, sekutu, hingga pihak Belanda. Hampir seluruh daerah di Indonesia terjadi pertempuran. Prajurit-prajurit dari kesatuan militer Indonesia terus bertempur hingga titik darah penghabisan mempertahankan kemerdekaan dari pihak penjajah. Tidak ada sebuah pertempuran atau perang yang benar-benar berlangsung tanpa meninggalkan korban, baik

korban-korban material atau bahkan korban jiwa dan korban-korban yang menjadi cacat setelahnya.

Pada tahun 1946, berdiri sebuah organisasi yang menaungi para bekas pejuang yang invalid atau mengalami kecacatan akibat perang atau prajurit yang menjadi korban perang. Organisasi ini terbentuk atas dasar belum adanya rumah yang menaungi para bekas pejuang yang mengalami invalid atau cacat untuk kehidupan mereka selanjutnya. Penanganan terhadap korban perang masih jauh dari kata memuaskan.

Organisasi ini berdiri pada 28 November 1946 di asrama invaliden, Komplek Perumahan Genduk Watu, Malang dengan nama Ikatan Invaliden Indonesia yang merupakan pelopor dari organisasi invaliden di Indonesia. Ikatan Invaliden Indonesia dibentuk atas inisiatif para invaliden itu sendiri. Ikatan Invaliden Indonesia merupakan organisasi invaliden pertama yang ada di Indonesia. Anggotanya adalah para korban Perang Kemerdekaan yang mengalami kecacatan.

Satu tahun setelah Ikatan Invaliden Indonesia berdiri di Malang, Persatuan Perjuangan Invaliden lahir di Surakarta. Organisasi invaliden di Surakarta dibentuk oleh Hasan Basri dengan nama organisasi Persatuan Perjuangan Invaliden yang disingkat menjadi PERPERI. Pembentukan PERPERI mendapat dukungan dan bimbingan penuh dari Dr. Suharso dan mendapat restu dari Gubernur Militer Surakarta yaitu Kolonel Gatot Subroto (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, 1990:40).

Pada 6 Juni 1947 diadakan rapat penggabungan antara Ikatan Invaliden Indonesia dengan PERPERI di Malang. Hasil dari rapat fusi antara Ikatan Invaliden Indonesia dengan PERPERI yaitu terbentuk Persatuan Invaliden Indonesia atau PII. Dewan pimpinannya sendiri disepakati berkedudukan di Surakarta. Setelah adanya penggabungan tersebut, pada akhir Juni 1947, para penderita cacat dari daerah-daerah pendudukan belanda seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berkumpul di Surakarta.

Pada 18 Juni 1948, menyusul berdirinya organisasi invaliden yang sudah ada, di Jogjakarta terbentuk Corps Invaliden Resimen 22 yang kemudian disebut sebagai CIR 22. Organisasi invaliden di Jogjakarta ini didirikan oleh Zar'an Hajid. Pada Januari 1950 di Purwakarta, Jawa Barat, berdiri juga organisasi yang menaungi para invaliden. Organisasi tersebut bernama KORPINDO yang merupakan singkatan dari Korban Perang Perjuangan Indonesia. KORPINDO dipimpin oleh Moh. Syaifeie. Anggota-anggota dari organisasi ini

terdiri dari anak buah K, L dan M/Pst.III/Terr.III/Divisi Siliwangi, Brigade XIV di bawah pimpinan Mayor Sambas, jika ditotal secara keseluruhan, jumlah anggota KORPINDO saat itu adalah 190 orang (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, 1990:76).

Pada Februari 1950, organisasi invaliden Jawa Barat resmi terbentuk. Organisasi ini berdiri di Jakarta atas prakarsa A.S Efendi dan dibantu oleh Raspati dan Syahril. Organisasi invaliden Jawa Barat ini diberi nama Persatuan Invaliden Indonesia. Pada 25 Februari 1950, berdiri juga sebuah organisasi yang menjadi tempat bersatunya para invaliden di Madiun, Jawa Timur. Organisasi ini bernama Perkumpulan Invaliden Daerah Madiun. Pembentukan organisasi ini atas perintah Komandan Batalyon Yudo yang memerintahkan untuk mengumpulkan anggota batalyon yang cacat jasmani akibat peran sertanya dalam perang kemerdekaan, para invaliden kemudian diasramakan di Jalan Kresno, Madiun.

Organisasi daerah yang terbentuk selanjutnya sebelum penyatuan berada di Jember, Jawa Timur. Pada Maret 1950 berdiri organisasi invaliden di Jember dengan nama Corps Invaliden Karesidenan Besuki. Organisasi ini berdiri atas perintah Mayor Suroyo kepada saudara Wagino dan Hasan untuk mengumpulkan para korban perang dari berbagai batalyon. Periode awal pembentukan disebut sebagai periode pendahuluan dimana organisasi yang menampung para invaliden masih terbentuk dan hanya menaungi secara kedaerahan belum secara keseluruhan.

Perkembangan Organisasi Cacat Vetaran (1950-1983)

Kejadian awal 1950 merupakan penyebab untuk para invaliden di seluruh daerah Indonesia bersatu menyusun barisan yang kuat. Pihak Corps Invaliden Jogjakarta mengajukan rencana adanya Konferensi Invaliden yang pertama kepada pemerintah dan staf angkatan perang. Berkat bantuan dari Kementerian Pertahanan (atas dorongan Sec. Dj. Mr. Ali Budiardjo dan Overste Widya dan Maj. Utoyo) maka persiapan Konferensi Invaliden pertama segera disiapkan di Semarang (Corps Invaliden Jogjakarta, 1950:17)

Konferensi Invaliden yang pertama di Semarang berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang cukup untuk menjadi langkah awal untuk mencapai cita-cita bersama para invaliden. Hasilnya adalah pada tanggal 18 Mei 1950 akhirnya terbentuk organisasi invaliden seluruh Indonesia yang disebut dengan Ikatan

Invaliden Seluruh Indonesia (IISI) yang terbentuk di Semarang, Jawa Tengah (Corps Invaliden Jogjakarta, 1950:17).

Hal utama yang menjadi tujuan adalah pembentukan diri dari pensiun, penempatan tenaga kerja, kesehatan, bimbingan, pendidikan dan pembinaan organisasi secara integral. Setelah IISI terbentuk, organisasi-organisasi invaliden tiap daerah kemudian berubah nama menjadi IISI cabang daerah masing-masing, tidak lagi menggunakan nama yang dibuat di tiap daerah sebelum IISI terbentuk. Daerah-daerah yang sebelumnya belum memiliki organisasi untuk para invaliden, perlahan-lahan mulai terbentuk (Kementerian Penerangan, 1959:392).

Kongres pertama ini diadakan di Bandung pada 23 Agustus 1952. Kongres ke-1 ini dihadiri oleh 23 organisasi invaliden tiap daerah atau cabang. Hasil paling menonjol dari Kongres pertama ini adalah perubahan nama organisasi dari Ikatan Invaliden Seluruh Indonesia menjadi Ikatan Penderita Tjatjad Indonesia atau IPTI dan diketuai oleh Hasan Basri (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, 1982:16). Perubahan nama organisasi terjadi dikarenakan organisasi masih mencari nama yang sesuai seiring dengan perkembangannya dan tujuan organisasinya. Perubahan nama tidak merubah tujuan organisasi tetapi hanya sebagai pencarian nama yang sesuai dan mewakili para invaliden seluruh Indonesia (Muaya, 13 September 2020).

Pada 1956, IPTI mengadakan kongres ke-3 yang dilaksanakan di Malang dan IPTI kembali berubah nama menjadi Ikatan Tjatjad Veteran Republik Indonesia (ITVI). Kata veteran pada akhirnya digunakan bersamaan dengan diadakannya kongres bekas pejuang seluruh Indonesia sekaligus dalam kongres tersebut disepakati untuk mengganti penyebutan bekas pejuang menjadi kata veteran (Legiun Veteran Republik Indonesia, 2011:3).

Kongres badan bekas pejuang kemerdekaan memiliki hasil yang luar biasa bagi para veteran pejuang. Pada 2 Januari 1957 sebagai hasil dari kongres pertama yang diadakan di Jakarta, terbentuk organisasi yang menaungi seluruh veteran di Indonesia. Nama organisasi ini adalah Legiun Veteran Republik Indonesia yang dibentuk dan disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 1957. Dalam keputusan presiden tersebut, Legiun Veteran Republik Indonesia menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi seluruh veteran di Indonesia serta mewakili veteran dalam

hubungannya dengan instansi-instansi pemerintah dan organisasi-organisasi veteran internasional (Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 Tahun 1957).

Sejak terbentuknya Legiun Veteran Republik Indonesia, seluruh organisasi veteran yang berada di Indonesia melebur ke dalam dan berada dalam koordinasi serta naungan LVRI. Sekalipun ITVI sudah memiliki wakil-wakil yang dianggap cukup dalam keanggotaan kepengurusan dalam LVRI, namun karena pada waktu itu situasi masyarakat diliputi oleh serba politik, termasuk LVRI, maka cacat veteran ikut menjadi incaran kedalam pengelompokan-pengelompokan tersebut. Pimpinan ITVI mencoba menyelamatkan perjuangan dan kesatuan anggota dengan mendirikan suatu Lembaga, yaitu Lembaga Kesejahteraan Penderita Tjatjad Indonesia (LKPTI) yang dibentuk pada 31 Oktober 1962 tanpa menggunakan kata veteran dikarenakan pada 1958 ada larangan penggunaan kata veteran terkecuali Legiun Veteran Republik Indonesia (PEPERLU Prt/Peperpu/033/1958).

Masa-masa klimaks bagi LKPTI terjadi setelah meletusnya peristiwa G30S pada 30 September 1965 dimana para veteran dengan Legiun Veteran Republik Indonesia tidak luput menjadi sasaran dan banyak diantara para veteran yang sadar maupun setengah sadar tergabung kedalam gerakan pemberontakan G30S. Pada 2 Oktober 1965, LKPTI melakukan tindakan pembersihan terhadap para pengurus yang ada terkena pengaruh dalam jurang pemberontakan G30S (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, 1975:172). Pembersihan organisasi dilakukan dengan cara memberhentikan pengurus dan anggota yang menjadi tersangka serta mengeluarkan pernyataan pengutukan terhadap peristiwa G30S yang diikuti dengan perombakan pimpinan pusat dan menyelamatkan anggota-anggota serta hak milik organisasi agar tidak disalah gunakan oleh pihak lain.

Perombakan kembali ditingkatkan menjadi perombakan organisasi total dimana diadakan Musyawarah Nasional ke-4 di Lembang, Bandung pada tanggal 20-23 Juli 1966. Perombakan organisasi dituangkan dalam musyawarah ini merubah dan menambahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hingga pada akhirnya membentuk satu-satunya organisasi cacat veteran di Indonesia yaitu Korps Cacat Veteran Republik Indonesia (KCVRI).

Keberlangsungan Organisasi dan Bantuan-bantuan

Disahkannya Korps Cacat Veteran Republik Indonesia sebagai suatu wadah untuk cacat veteran tidak membuat perjuangan berhenti. Konsolidasi dan pembinaan organisasi terus dipergiat dengan cara-cara pendekatan-pendekatan dan pertemuan-pertemuan resmi dengan instansi-instansi terkait sejak 1971 hingga 1973. Usaha-usaha konsolidasi tersebut ternyata disambut dengan hangat oleh Presiden dan Menteri-menteri terkait, KCVRI mendapatkan bantuan dari Presiden dan Menteri-menteri terkait dalam hal moriil dan materiil.

Pada 23 Mei 1974, pengadaan rumah bagi anggota telah terlaksana. Sebanyak 20 rumah diserahkan kepada anggota KCVRI di Surabaya atas bantuan Walikota Kotamadya Surabaya. Kemudian pada 14 November 1978, penyerahan perumahan untuk para anggota KCVRI kembali dilakukan. Penyerahan berjumlah sebelas perumahan di Kompleks Perumahan Seroja, Bulakmacan, Bekasi. Tanah-tanah yang diberikan oleh walikota setempat kemudian dibangun perumahan yang diperuntukkan bagi anggota. Pembangunan perumahan dilakukan oleh Yayasan Dharmais yang dipimpin oleh Presiden soeharto.

Pada 1975 tepatnya pada tanggal 18 Mei, KCVRI mengadakan peringatan hari ulang tahun "Seperempat Abad KCVRI". Peringatan ini dilaksanakan dengan meriah dan dilangsungkan di Jalan Tambak No11A, Jakarta. Peringatan ini sekaligus menandai pemindahan kantor pusat KCVRI yang semula berada di Jalan Gajah Mada No.125 menjadi di Jalan Tambak No.11A. Pada hari ulang tahun yang ke-25 ini juga KCVRI menerbitkan sebuah buku yang berjudul "Seperempat Abad Korps Cacat Veteran Republik Indonesia" yang diterbitkan oleh PT PENCA.

Pada 1980, KCVRI mendapatkan sebuah kabar duka cita. Ketua Umum KCVRI yaitu Mayor Jenderal (Purn) Bambang Utoyo yang sedang menjalani pengobatan di Bonn, Jerman Barat, telah tutup usia. Berpulanginya Ketua Umum KCVRI yang pertama membuat organisasi mengadakan Sidang Pleno Luar Biasa di Aula Gedung BPHP KCVRI. Pada 23-27 September 1981 organisasi cacat veteran mengadakan sidang Dewan Pleno Pusat di Pusklat Pramuka, Cibubur, Jakarta. Hasil dari sidang pleno adalah memilih serta mengukuhkan H. Soeharso MS menjadi ketua umum organisasi cacat veteran selanjutnya. Selain itu, organisasi cacat veteran kembali menyusun dan menetapkan langkah-langkah baru dalam menjalankan organisasi.

Pengadaan rumah, jaminan-jaminan sosial, dan perjanjian-perjanjian dengan berbagai instansi terus dievaluasi dan dilakukan. Tahun 1983 tercatat sebagai tahun dimana telah terpenuhinya seluruh kesejahteraan para anggota. Hingga tahun tercatat telah dibangun sebanyak 582 buah rumah dan 300 rumah yang diberikan kepada seluruh anggota di berbagai cabang. (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, 1990:22). Selain itu, masalah-masalah organisasi juga perlahan-lahan telah terselesaikan secara nyata dan dapat dinikmati termasuk bantuan-bantuan dari berbagai instansi dan pendidikan bagi para anggota.

Kegiatan dalam Bidang Pendidikan

Sejak berdirinya Ikatan Invaliden Indonesia pada tahun 1950, hal pertama yang difokuskan adalah perihal Pendidikan para invaliden. Mengingat bahwa pada umumnya para invaliden telah meninggalkan bangku sekolah dan tidak mempunyai kesempatan untuk menambah pengetahuannya. Pendidikan untuk para invaliden dilakukan dengan cara mendirikan balai Pendidikan di tiap-tiap Corps Invaliden daerah. Corak dan bentuk dari balai Pendidikan ini ditentukan masing-masing oleh Corps Invaliden sendiri berdasarkan keadaan di daerahnya masing-masing serta biaya dari balai Pendidikan ini juga diusahakan oleh Corps-corps Invaliden dengan jalan yang sah (Keputusan-Keputusan dalam Konferensi Invaliden, 1950).

Para invaliden yang memiliki dasar pendidikan sekolah menengah dan memiliki kemampuan serta keinginan, dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan-Perguruan Tinggi. Dengan bekerja sama dengan Rehabilitation Centrum dan Pusat Latihan Karya Veteran, telah menghasilkan pendidikan atau latihan karya hingga tahun 1974 sebanyak 1421 orang yang terdiri dari kejuruan menjahit, kejuruan las APP, kejuruan peternakan, kejuruan pertanian, kejuruan perikanan dan kejuruan lainnya.

Kegiatan dalam Bidang Sosial

Dalam menghadapi berbagai bencana alam, KCVRI tidak tinggal diam. KCVRI turut serta membantu korban bencana alam gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sukabumi pada 2 November 1969. Selain itu, KCVRI juga memberikan bantuan kepada korban bencana alam banjir yang terjadi di Kabupaten Lamongan.

Selain itu, para cacat veteran juga berusaha untuk menjaga ketertiban masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut dibuktikan dengan turut sertanya KCVRI dalam pengendalian kemelut yang terjadi antara mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan Akademi Angkatan Kepolisian pada tahun 1970. Dialog dilakukan oleh KCVRI sebagai seorang bapak terhadap seorang anak. Hal tersebut mengubah konflik yang sebelumnya memanas menjadi mereda bahkan tidak lama kemudian hilang tanpa bekas.

KCVRI tidak hanya memerhatikan keadaan para anggota saja, keadaan luar pun tidak luput dari perhatian KCVRI. Dengan para penyandang cacat umum, KCVRI berusaha menjalin hubungan baik. KCVRI mengadakan suatu seminar bersama yaitu Seminar Cacat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Cacat Veteran dan Cacat Umum yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1972 di Gedung Pola yang terletak di Jalan Prokamasi No.56, Jakarta Pusat. Banyak hasil yang diperoleh melalui seminar tersebut namun satu yang pasti hasilnya adalah para penyandang cacat menghadapi masalah yang sama yaitu pelayanan rehabilitasi yang perlu ditingkatkan.

Kegiatan dalam Bidang Ekonomi

Organisasi cacat veteran melakukan berbagai usaha ekonomi. Berbagai usaha dan upaya dilakukan dengan cara jalan yang sah. Dalam hal mendirikan suatu usaha, organisasi cacat veteran tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dengan suatu badan lain ataupun dengan perorangan (Muaya, 13 September 2020).

Sejak tahun 1950 di Jakarta atau sejak masa Ikatan Invaliden Seluruh Indonesia terbentuk, organisasi cacat veteran telah menerima kredit dari Bank Pembangunan Negara berupa satu percetakan kecil seharga Rp340.000 dan ditambah Rp1.000.000 (harga emas pada 1953 berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1953 adalah Rp12.7 pergram) yang diberikan oleh Bank Pembangunan Indonesia (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, 1975:62). Percetakan tersebut diberi nama PT. PENCA yang menerbitkan majalah hanya untuk kepentingan internal (tidak diperjualbelikan). Majalah tersebut bernama "Berita Harian Invaliden". Terbit pertama kali pada tanggal 15 Maret 1951 di Jakarta. Pada tahun 1952, "Berita Harian Invaliden" berubah nama menjadi "Majalah Penderita Tjatjad", yang terbit pertama kali pada tanggal 1 Oktober 1952, majalah ini terbit satu kali dalam satu bulan. (Muaya, 13 September 2020).

Pada 1974, organisasi cacat veteran cabang Jawa Timur menerima bantuan yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur yaitu pembangunan proyek udang dan kodok dengan biaya Rp15.000.000. Proyek ini merupakan salah satu usaha Badan Pengurus Harian Daerah yang mana hasilnya diperuntukkan untuk kesejahteraan anggota. Proyek ini digarap oleh perwakilan PT PENCA dengan lokasi tambak di Kecamatan Bangil Pasuruan. Selain itu, untuk penampungan dan penambahan dana, KCVRI juga mendirikan suatu proyek penyulingan minyak sereh dengan nama proyek Proyek Perkebunan Sereh Wangi seluas kurang lebih 300 HA atas milik KCVRI sendiri yang terletak di desa Pasir Joho, Sukabumi.

Usaha ekonomi lainnya yang dilakukan adalah pada 1977, Badan Pengurus Daerah Jawa Barat membuat proyek pembuatan plat nomor kendaraan bermotor. Usaha tersebut merupakan bagian dari fasilitas pemerintah yang diberikan kepada Korps Cacat Veteran Republik Indonesia atas kebijaksanaan Kapolri. Usaha tersebut terjalin berdasarkan perjanjian kerja sama tertanggal 1 Juni 1977 hingga 30 Juni 1992 (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, 1990:48).

Usaha-usaha perekonomian terus dilakukan KCVRI dengan bekerja sama dengan para investor guna mendapatkan dana yang ditujukan bagi kesejahteraan para anggota serta sebagai sarana pemberdayaan para anggota ke dalam ketenaga kerjaan seduai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing.

Melakukan Hubungan Kerja Sama dengan Organisasi Veteran Luar Negeri

Pada 1953, Ikatan Penderita Tjajad Indonesia (IPTI) mencoba untuk menjalin hubungan dengan organisasi veteran luar negeri dan mencoba menjadi anggota dari organisasi veteran sedunia. Hal tersebut dilakukan dengan harapan akan memiliki pengetahuan lebih mengenai rehabilitasi untuk para penyandang cacat serta pengetahuan lebih mengenai cara pengorganisasian di luar Indonesia.

Pada 11 November 1953, R. Moh Saleh ditunjuk sebagai delegasi IPTI untuk berangkat ke Den Haag dan menghadiri Kongres Federasi Veteran Dunia. R. Moh Saleh didampingi oleh Dr. Soeharso yang merupakan ahli medis dalam IPTI dan merupakan anggota konsultan medis WVF (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, 1982:18).

Atas undangan Legiun Veteran Filipina, Hasan Basri ditugaskan lagi untuk menghadiri pertemuan di Manila yang diselenggarakan pada 11 Mei 1954 selaku peninjau pertemuan seluruh organisasi Bekas Pejuang Filipina. Pada 24 Mei 1954, IPTI menerima tamu dari *World Veterans Federation* atau WVF yaitu Mr. Robert Joucum yang merupakan wakil sekretaris jenderal. Pada kesempatan ini, permintaan formal diteruskan untuk menjadi anggota WVF dan persetujuan selambat-lambatnya diterima pada 27 November 1954, pada saat Kongres ke-5 WVF di Wina, Austria (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, 1982:18).

Pada kesempatan itu, Hasan Basri menghadiri kongres dan hasilnya adalah IPTI diterima menjadi anggota WVF bahkan ditunjuk sebagai anggota Dewan Federasi Veteran Dunia untuk Indonesia dan Dr. Soeharso terpilih sebagai Medical Consul Member. Diterimanya IPTI menjadi anggota WVF membuka jalan lebih lebar terhadap hubungan luar negeri dengan organisasi-organisasi cacat veteran yang lain. IPTI yang posisinya sebagai anggota Dewan Federasi Veteran dunia secara aktif menghadiri dan mengikuti setiap kongres yang diadakan oleh WVF.

Sejalan dengan terbentuknya Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan organisasi satu-satunya veteran di Indonesia, maka keanggotaan IPTI dalam WVF diserahkan kepada LVRI pada 1957 dan segala kegiatan keveteranan berada dalam naungan LVRI. Namun, organisasi cacat veteran tetap memiliki peranan dalam menjaga hubungan dengan WVF dan tetap ikut serta bersama LVRI dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan atau bersama WVF.

KESIMPULAN

Perang kemerdekaan Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu 1946-1949 menyebabkan banyaknya pejuang yang menjadi cacat setelahnya. Keinginan untuk terus dan tetap berguna bagi bangsa dan negara merupakan hal utama yang membuat para cacat pejuang atau cacat veteran bersatu dan membuat sebuah organisasi untuk mewadahi seluruh cacat pejuang sehingga Ikatan Invaliden Indonesia terbentuk pada 1946. Periode 1946-1950 merupakan periode awal organisasi cacat veteran dimana pada masa ini merupakan masa awal terbentuknya organisasi-organisasi yang menampung para cacat

pejuang di tiap-tiap daerah di Indonesia sehingga pada masa ini organisasi cacat pejuang hanyalah bersifat kedaerahan.

Dalam kurun waktu 1950-1983, organisasi cacat veteran banyak mengalami perkembangan. Organisasi menjadi bersifat nasional pada tahun 1950 dan mengalami beberapa kali pergantian nama hingga akhirnya organisasi cacat veteran diakui dan disahkan pemerintah pada tahun 1966 dengan nama Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. Organisasi cacat veteran menjadi organisasi yang memiliki eksistensi tinggi dan mendapatkan banyak perhatian baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Bantuan-bantuan diberikan kepada para cacat veteran, baik bantuan moriil ataupun materil. Cabang-cabang dari organisasi cacat veteran sudah tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki anggota 3008. Cita-cita organisasi terus diusahakan bersama-sama, kesejahteraan para anggota juga terus diperjuangkan oleh seluruh pengurus hingga akhirnya pada 1983 organisasi cacat veteran mencapai titik terpenuhinya kesejahteraan seluruh anggota dan terselesaikannya masalah-masalah dalam organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (1950). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota TNI yang pada Masa Penyerahan Kedaulatan tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat*.
- BPHP Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. (1975). *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan*. Jakarta: PT. PENCA.
- BPHP Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. (1977). *Seperempat Abad Korps Cacat Veteran Republik Indonesia*. Jakarta: PT. PENCA.
- BPHP Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. (1990). *Empat Dasa Warsa Korps Cacat Veteran Republik Indonesia 1950-1990*. Jakarta: PT. PENCA.
- BPHP Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. (1992). *A Short History*. Jakarta: PT.PENCA.
- Corps Invaliden Jogjakarta. (1950). *Kenang-kenangan Invaliden. Jogjakarta: Corps Invaliden Jogjakarta*
- Dahm, B. (1987). *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3S.

- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Kementerian Penerangan. (1959). *Kota Pradja Djakarta Raya*. Jakarta: Kementerian Penerangan
- Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. (1950). *Keputusan-keputusan dalam Konferensi Invaliden Seluruh Indonesia Ke-1*.
- Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. (1966). *Keputusan Menteri Veteran dan Demobilisasi No.435.10.2/1966 tentang Pengesahan Korps Cacat Veteran Republik Indonesia*.
- Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. (1970). *Surat Terbuka Korps Cacat Veteran Jawa Barat kepada Mahasiswa ITB*.
- Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. (1982). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Cacat Veteran Republik Indonesia*.
- Legiun Veteran Republik Indonesia. (2010). *Selayang Pandang Lengiun Veteran Republik Indonesia*. Jakarta: LVRI
- Nasution, A. H. (1991). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid II*. Bandung: Angkasa.
- Pour, J. (2008). *Ign. Slamet Rijadi: Dari Mengusir Kempetai Sampai Menumpas RMS*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setyohadi, T. (2002). *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: CV Rajawali Corporation.
- Surjohadiprodjo, S. (1972). *Langkah-langkah Perdjjoangan Kita*. Jakarta: Balai Pustaka.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5508>, diakses pada 22 Desember 2019, pukul 16.30 WIB

Wawancara

- Prawirowisastro, Soepranoto. *Ketua Umum Badan Pengurus Harian Pusat Korps Cacat Veteran Republik Indonesia*, dilakukan wawancara pada 10 Maret 2020, pukul 10.21 WIB.
- Muaya, Ronni M. R., *Mantan Pengurus Badan Pengurus Harian Pusat Korps Cacat Veteran Republik Indonesia*, dilakukan wawancara pada 13 September 2020, pukul 13.58 WIB.